

ABSTRAK

Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi yang tergabung dalam Sistem peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* (CJS), yang diawali oleh penyidikan, dilanjutkan dengan Penuntutan dan diakhiri oleh pengadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyidikan pada penegakkan hukum di Indonesia tidak terkecuali penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak

Adapun masalah dalam kasus tindak pidana kekerasan ini yaitu: Bagaimana Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo ? Apa kendala penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo dan bagaimana upaya penanggulangannya? Bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang akan datang.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan 2 penyidik di Polres Purworejo. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum. Permasalahan di analisis dengan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Purworejo belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversifikasi. Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Purworejo meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversifikasi, serta lemahnya bantuan hukum yang dilakukan advokat dan badan pemasyarakatan anak dalam melakukan upaya diversifikasi. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di Polres Purworejo yaitu berupa penanggulangan secara preventif dan juga secara represif. Yang mana penanggulangan secara preventive dilakukan dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada ibu-ibu dan organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum, dan melakukan kerja sama dengan masyarakat. Sedangkan pencegahan secara represif dapat dilakukan dengan cara pengembangan system respon yang cepat, dan mengadakan pembinaan terhadap pemuda seperti remaja masjid, dan memberantas peredaran buku/majalah, serta VCD porno di Kota Purworejo. Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan. Pertama, Model Hak-Hak Prosedural (*The Prosedural Rights Model*) yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Kedua, Model Pelayanan (*Sevice Model*) yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi.

Kata kunci : Kebijakan, Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, Kekerasan

ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia is carried out by several institutions incorporated in the Criminal Justice System (CJS), initiated by the investigation, followed by Prosecution and terminated by the court. The Republic of Indonesia National Police is one of the government institutions responsible for investigating law enforcement in Indonesia, including investigating crimes against children.

The problem in this case of violence is: How to investigate criminal acts of violence against children in Purworejo Regional Police Station? What are the obstacles to investigating the crime of violence against children in Purworejo District Police Station and how to deal with them? How is the policy of investigating criminal acts of violence against future children.

The methodology in the study is an empirical juridical approach. The types and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with 2 investigators at Purworejo District Police Station. Secondary data is obtained from literature studies that discuss law enforcement theory. Problems are analyzed with law enforcement theory.

Based on the results of the study that the process of investigating criminal acts of violence against children in the Purworejo District Police jurisdiction has not been implemented in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. This is due to a lack of adequate human resources support and the participation of the people who are still weak in the implementation of diversion. Constraints that prevent the police from carrying out the process of investigating criminal acts of violence against children in the Purworejo District Police jurisdiction include lack of Human Resources, lack of awareness of parents or victims related to diversion, as well as weak legal assistance made by advocates and child correctional institutions in making efforts diversion. Efforts to eradicate crime against children at Purworejo Regional police station in the form of preventive and repressive measures. Which is preventive prevention is done by giving appeals to mothers and women's organizations, conducting supervision of children, conducting routine patrols, conducting legal counseling, and cooperating with the community. Whereas repressive prevention can be carried out by developing a rapid response system, and providing guidance to young people such as adolescent mosques, and eradicating the circulation of books / magazines and pornographic VCDs in Purworejo City. Advocacy policies for the protection of victims of violence against children in the future can be done through two service models. First, the Procedural Rights Model, which emphasizes the possibility of victims playing an active role in the criminal process or in the course of the judicial process. Second, the Service Model which emphasizes the need to create standard standards for fostering crime victims, which can be used by the police.

Keywords: Policy, Investigation, Children, Crime, Violence